



**PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN LEDAKAN GAS LPG
(Suatu kajian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen)**

*APPLICATION OF THE RES IPSA LOQUITUR DOCTRINE IN
ORDER THE LEGAL PROTECTION OF VICTIMS
OF LPG GAS OF EXPLOSION
(A Study Of The Consumer Protection Statute)*

**HENDRI KURNIAWAN
NIM 060710101105**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

Created with



nitroPDF

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

SKRIPSI

**PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN LEDAKAN GAS LPG
(Suatu kajian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen)**

*APPLICATION OF THE RES IPSA LOQUITUR DOCTRINE IN
ORDER THE LEGAL PROTECTION OF VICTIMS
OF LPG GAS OF EXPLOSION
(A Study Of The Consumer Protection Statute)*

**HENDRI KURNIAWAN
NIM 060710101105**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

MOTTO

***JURIS PRAECEPTA SUNT HAEC; HONESTE VIVERE, ALTERUM NON
LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE***

(Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan
memberikan orang lain haknya).¹

”Peribahasa Latin”



¹ Dalam “Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan kontemporer “, Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Ibundaku Kastini dan Ayahanda Selo Ahmad Rofi'i tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepada anakmu selama ini;
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang Sangat Kubanggakan;
3. Seluruh Bapak/Ibu Guru dan Dosenku yang telah membimbing, mengajarkan serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
4. Agama, Negara dan Bangsa Indonesia Tercinta.

**PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN LEDAKAN GAS LPG
(Suatu kajian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen)**

*APPLICATION OF THE RES IPSA LOQUITUR DOCTRINE IN
ORDER THE LEGAL PROTECTION OF VICTIMS
OF LPG GAS OF EXPLOSION
(A Study Of The Consumer Protection Statute)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**HENDRI KURNIAWAN
NIM 060710101105**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

Created with



nitroPDF

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 9 JUNI 2011

Oleh :

Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Created with



nitro PDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LEDAKAN GAS LPG
(Suatu kajian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen)**

*APPLICATION OF THE RES IPSA LOQUITUR DOCTRINE IN ORDER THE
LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF LPG GAS OF EXPLOSION (A Study Of
The Consumer Protection Statute)*

Oleh :

HENDRI KURNIAWAN
NIM 060710101105

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 195701051986031002

NIP. 196010061989021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.

NIP. 1960010111988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : RABU

Tanggal : 22

Bulan : JUNI

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H. FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001 NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

(.....)

NIP. 195701051986031002

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

(.....)

NIP. 196010061989021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI KURNIAWAN

NIM : 060710101105

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : ***Penerapan doktrin Res Ipsa Loquitur dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban ledakan gas LPG (Suatu kajian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen)*** sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2011

Yang menyatakan,



HENDRI KURNIAWAN

NIM. 060710101105

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LEDAKAN GAS LPG (Suatu kajian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen)**”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Drs. Supardi, M.Pd., Dosen Pembimbing Akademik;

8. Ayahanda Selo Ahmad Rofi'i dan Ibunda Kastini tercinta, Kakak penulis Pipit Fitriani, S.Hum., yang senantiasa sabar dan tak kenal lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan do'a yang tulus untuk ananda dalam setiap langkah hidup ini, serta keluarga besar terima kasih untuk kasih sayang, motivasi, dukungan serta semangat yang diberikan selama ini.;
9. Om Aries, Setyo, Eril dan Eko Sekeluarga, terima kasih untuk kasih sayang, motivasi, dukungan serta semangat yang diberikan selama ini;
10. Bella Albertina yang telah mendukung penulis dengan memberikan perhatian, doa, semangat dan kesabaran untuk selalu menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Ardian S., Iwan, Wulan, Udin, Melisa, Yuni, Firman, Gabriel, Aris F., Ariesta, Anti, Cita A., Chiko, Isna, Etis, Indra, dan Keluarga Besar GMNI Komisariat Hukum Cabang Jember terima kasih untuk diskusi dan ilmu yang sangat bermanfaat, tetap semangat dan berjuang;
12. Keluarga di Baskit Sempolan (Mbah Tin, Mas Jito, Mbak Sih) yang telah memberiku banyak pengalaman hidup dan memberikan warna kehidupan bagi penulis;
13. Tim KKM di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember : Anggi, Bella, Junaidi, dan juga kawan-kawan tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih buat kekompakan dan kerja samanya;
14. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2006, yang tidak bisa disebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.
Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Program konversi minyak tanah ke gas LPG yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah disetidaknya ada 3 (tiga) pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Sasaran dari program yang sudah berjalan selama hampir 3 tahun ini adalah masyarakat menengah baik rumah tangga maupun yang memiliki usaha menengah. Berjalannya program konversi ini ternyata terjadi persoalan yang bermunculan di masyarakat. Persoalan yang menghangat belakangan ini sejumlah kasus tabung gas LPG 3 kilogram yang dibagikan gratis oleh pemerintah meledak dan membahayakan masyarakat. Data yang diperoleh Badan Standar Nasional (BSN) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tidak mendapat respon positif dari pemerintah, bahkan malahan lamban untuk mengatasinya. Hal ini terlihat dari sikap-sikap para pihak yang dipercaya menangani program ini melalui pernyataannya, saling lempar tanggung jawab dan tidak berusaha mencari solusi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LEDAKAN GAS LPG (Suatu kajian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen)”**.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana peran doktrin *res ipsa loquitur* terhadap korban dalam proses pembuktian hukum keperdataan, apakah perlindungan hukum terhadap korban atas penggunaan *res ipsa loquitur* dalam kasus ledakan gas LPG dapat diberikan dan apa Akibat hukum berlakunya doktrin *res ipsa loquitur* terhadap pelaku usaha dalam perbuatan melawan hukum.

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran doktrin *res ipsa loquitur* terhadap korban dalam proses pembuktian hukum keperdataan, perlindungan hukum terhadap korban atas penggunaan *res ipsa loquitur* dalam kasus ledakan gas LPG dapat diberikan, dan akibat hukum berlakunya doktrin *res ipsa loquitur* terhadap pelaku usaha dalam

perbuatan melawan hukum. Tipe penulisan skripsi ini adalah *yuridis normatif* dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual.

Bahwa kedudukan doktrin *res ipsa loquitur* sendiri dalam tata hukum perdata Indonesia termasuk kajian dalam bidang hukum acara, khususnya hukum pembuktian, yang merupakan bagian dari hukum publik dan merupakan hasil kesimpulan yang ditarik oleh hakim akibat korban kesulitan dalam hal pembuktian surat ataupun saksi, yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Doktrin *res ipsa loquitur* merupakan doktrin yang digunakan oleh korban hanya perlu membuktikan secara langsung ditempat kejadian melalui fakta-fakta yang terjadi bahwa dirinya telah menderita kerugian akibat memakai barang yang telah diberikan oleh pelaku usaha melalui pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim yang digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu putusan. Penggunaan doktrin *res ipsa loquitur* ini memberikan bentuk perlindungan hukum bagi korban, yang tidak lain merupakan konsumen dari gas LPG.

Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh dengan adanya doktrin *res ipsa loquitur* merupakan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah pihak penyedia gas LPG, adalah bentuk tanggungjawab dalam hal ganti rugi. Ganti rugi yang harus diberikan dapat berupa ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi dan ganti rugi penghukuman yang didasarkan pada berat tidaknya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan.

Doktrin *res ipsa loquitur* merupakan salah satu cara untuk mempermudah pembuktian dalam suatu kejadian dapat memberikan rasa keadilan, nyaman dan juga kepastian dalam hukum. Hal ini yang didapat oleh korban atas kelalaian pelaku perbuatan melawan hukum, sehingga mempermudah untuk mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban yang dapat diperoleh korban yang juga konsumen tabung gas LPG dari pelaku perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban, baik kerugian materiil maupun immaterial berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metodologi Penulisan	7
1.4.1 Tipe Penulisan	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum	14
2.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	15
2.2 Perbuatan Melawan Hukum.....	18
2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	18
2.2.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	21
2.3 Sistem Pembuktian Dalam Hukum Keperdataan.....	24
2.4 <i>Res Ipsa Loquitur</i>	26
2.3.1 Pengertian <i>Res Ipsa Loquitur</i>	26
2.3.2 Syarat-syarat berlakunya doktrin <i>Res Ipsa Loquitur</i>	28

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Peran doktrin <i>Res Ipsa Loquitur</i> terhadap korban dalam proses pembuktian hukum keperdataan.....	29
3.2 Pelindungan hukum terhadap korban atas penggunaan <i>Res Ipsa Loquitur</i> dalam kasus ledakan gas LPG.....	34
3.3 Akibat hukum berlakunya doktrin <i>Res Ipsa Loquitur</i> terhadap pelaku usaha dalam perbuatan melawan hukum.....	41

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran	50

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

